

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini menyebabkan kerusakan di berbagai sektor. Penyebaran wabah yang sangat cepat menjadi salah satu faktor penyebab besarnya kerusakan yang terjadi. Upaya yang dilakukan untuk menahan penyebaran wabah ini tidak semuanya berhasil (Stiglitz, 2021). Covid-19 adalah wabah besar ketiga dari runtutan virus corona, setelah *SARS* dan *MERS*. Angka kematian akibat Covid-19 yang tinggi, menuntut individu untuk menghindari dari individu lain dengan memberlakukan jarak sosial dan penutupan bisnis yang ekstrim secara nasional (Keogh dkk., 2020).

Besarnya kerusakan yang timbul tergantung pada kondisi ekonomi dan sistem pemerintahan sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Guncangan pada sisi penawaran dan permintaan di berbagai sektor menjadi salah satu dampak dari adanya pandemi ini (Azomahou, 2021). Beberapa negara mampu dengan cepat menahan penyebaran virus, memungkinkan kerusakan yang timbul tidak terlalu besar dan pemulihan yang lebih cepat. Sementara negara-negara yang lain masih berjuang dengan jumlah kasus yang melonjak (Stiglitz, 2021).

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Covid-19 Di Indonesia

	Mar	– Jun	- Sep	– Des	- Mar	- Jun	-
	2020	2020	2020	2020	2021	2021	
Jumlah Kasus	1.528	56.385	287.008	743.198	1.511.712	2.053.995	
Meninggal	136	2.876	10.740	22.138	40.858	55.949	

Sumber : Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)

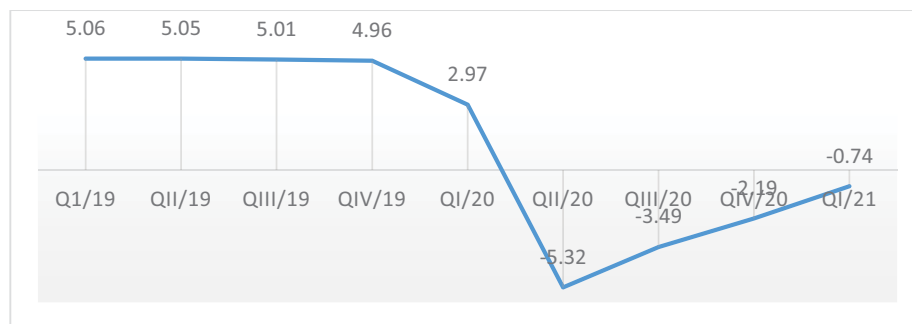
– 2021

Indonesia menjadi negara yang masih berjuang mengatasi jumlah kasus yang fluktuatif. Kenaikan jumlah kasus paling besar dengan melihat data diatas, terjadi antara bulan Desember 2020 hingga Maret 2021 dimana kenaikan jumlah

kasus sebesar 50.83% atau sebanyak 768.514 kasus positif. Kematian pada awal pandemi Covid-19 yakni bulan maret 2020 sebesar 136 kasus dan hingga juni 2021 tercatat 55.949 kasus kematian yang dilaporkan.

Jumlah kasus yang terus meningkat memberikan dampak negatif pada berbagai sektor tidak hanya sektor kesehatan. Beberapa sektor yang terdampak cukup besar adalah sektor ekonomi diikuti oleh sektor transportasi, pariwisata, perdagangan. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih lanjut, menyebabkan kegiatan ekonomi terhambat dan memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia (Susilawati dkk., 2020).

Terdapat beberapa saluran langsung dan tidak langsung pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Pasokan tenaga kerja dan produktivitas terganggu akibat adanya pengurangan waktu kerja hingga pengurangan jumlah pekerja yang akhirnya berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi (Keogh, 2020). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2021 tumbuh sebesar -0.74% dengan melihat besaran Produk Domestik Bruto (PDB).



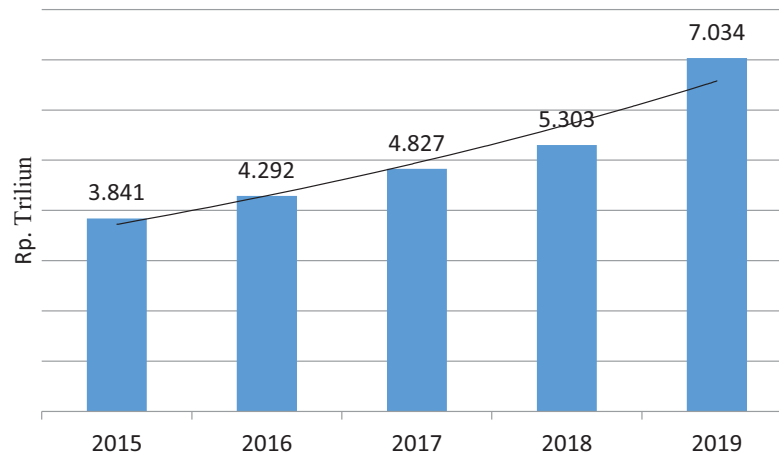
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia - 2021

Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Indonesia 2019 – 2021

Usaha mikro berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia terutama dalam kondisi pandemi Covid-19. Usaha mikro merupakan salah satu sektor usaha penggerak perekonomian di masa pandemi ini. Peran usaha mikro sebagai salah satu sumber penciptaan kesempatan kerja dan penggerak

pembangunan ekonomi di daerah (Tambunan, 2019). Peran usaha mikro dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar. Hal ini disebabkan oleh sifat industri mikro yang padat karya menuntut jumlah tenaga kerja yang besar dalam produktivitasnya (Sarfiyah, 2019).

Usaha mikro juga memiliki peranan besar dalam kontribusinya pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi usaha mikro terhadap PDB 2015-2018 seperti tampak pada Gambar 1.2 berikut :



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - 2019

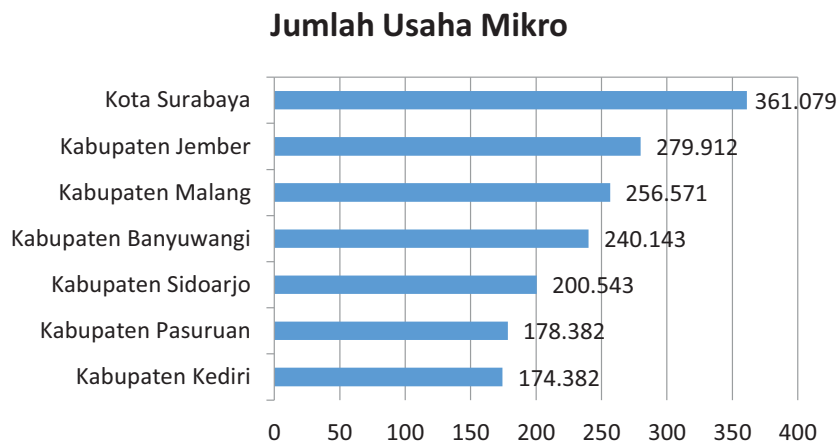
Gambar 1.2 Kontribusi Usaha Mikro terhadap PDB. 2015-2019

Pada masa pandemi ini, usaha mikro mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan dengan sektor usaha lain. Terutama dengan adanya kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah semakin membuat kondisi usaha mikro terpuruk akibat penurunan penjualan hingga kesulitan keuangan dalam kegiatan produksinya. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyatakan bahwa sebagian usaha IMK yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi, umumnya akan melakukan kebijakan sementara tidak berproduksi. Persentase jumlah usaha IMK yang sementara tidak berproduksi tertinggi terjadi pada triwulan II-2020, sebesar 15.35%. Sekitar 78.35% Usaha mikro terdampak pandemi, dimana sekitar 62.21% diantaranya mengalami kendala keuangan. Hasil survei IMK tahun 2020

menunjukkan sekitar 19.85% persen usaha IMK tutup, baik yang hanya tutup sementara waktu maupun yang tutup secara permanen.

Merespon permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha mikro, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memulihkan kembali kegiatan produksi usaha mikro sehingga perekonomian dapat berjalan kembali. Beberapa kebijakan pemerintah yang difokuskan untuk sektor usaha mikro antara lain berupa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), restrukturisasi kredit, modal kerja, dan dukungan lainnya (Natasya & Hardiningsih, 2021).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan gangguan perekonomian nasional yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Program tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, pertahanan, dan peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk tetap menjalankan usaha. Banpres produktif merupakan salah satu realisasi PEN yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro yang terdampak kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dari dampak negatif pandemi Covid-19.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur - 2016

Gambar 1.3 Kabupaten/Kota dengan Usaha Mikro Terbesar di Provinsi Jawa Timur

Menurut BPS Indonesia (2015), Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah usaha mikro terbesar kedua setelah Jawa Tengah dengan total jumlah usaha mikro sebanyak 820,8 ribu unit usaha. BPS Jawa Timur (2016) menyatakan bahwa Kota Surabaya merupakan wilayah dengan jumlah usaha mikro terbesar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur lainnya dengan jumlah usaha mikro sebesar 361.079 unit usaha. Posisi wilayah dengan jumlah usaha mikro terbesar setelah Kota Surabaya secara berturut-turut adalah Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang dengan jumlah usaha mikro sebesar 279.912 dan 256.571 unit usaha.

Nasution (2021) mengevaluasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Surabaya berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan. Faisol & Hakim (2020) mengevaluasi pemanfaatan kebijakan insentif pajak Covid-19 yang ditujukan terhadap UMKM di Indonesia. Narayanan (2021) meneliti bagaimana dukungan fiskal berdampak dalam tingkat ekonomi dan sektoral pada pandemi Covid-19 di Oseania. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, tidak banyak ditemukan penelitian yang membahas bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi terutama pada usaha mikro. Efektivitas melihat hubungan keberhasilan antara kebijakan atau prosedur yang dikeluarkan dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dikatakan efektif apabila kebijakan tersebut memiliki pengaruh dalam pemulihan ekonomi usaha mikro.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pengaruh program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan kebijakan bantuan presiden usaha mikro terhadap pemulihan ekonomi usaha mikro di Kota Surabaya?.
2. Bagaimanakah efektivitas pengaruh program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan kebijakan penjaminan kredit modal kerja terhadap pemulihan ekonomi usaha mikro di Kota Surabaya?.

3. Bagaimanakah efektivitas pengaruh program pemulihan ekonomi nasional (PEN) secara keseluruhan dalam bidang bantuan usaha mikro terhadap pemulihan ekonomi usaha mikro di Kota Surabaya?.
4. Bagaimanakah efektivitas pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit usaha mikro terhadap pemulihan ekonomi usaha mikro di Kota Surabaya?.
5. Bagaimanakah efektivitas pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap pemulihan ekonomi usaha mikro di Kota Surabaya?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi efektivitas pengaruh program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan kebijakan bantuan presiden usaha mikro terhadap pemulihan ekonomi usaha mikro di Kota Surabaya.
2. Mengevaluasi efektivitas pengaruh program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan kebijakan penjaminan kredit modal kerja terhadap pemulihan ekonomi usaha mikro di Kota Surabaya.
3. Mengevaluasi efektivitas pengaruh program pemulihan ekonomi nasional (PEN) secara keseluruhan dalam bidang bantuan usaha mikro terhadap pemulihan ekonomi usaha mikro di Kota Surabaya.
4. Mengevaluasi efektivitas pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit usaha mikro terhadap pemulihan ekonomi usaha mikro di Kota Surabaya.
5. Mengevaluasi efektivitas pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap pemulihan ekonomi usaha mikro di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari penelitian sebelumnya serta untuk membuktikan hasil penelitian sebelumnya apakah dapat konsisten dengan perbedaan lokasi penelitian yang ada dan untuk melanjutkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan pengamatan baru. Manfaat yang dapat diberikan pada penelitian ini diharapkan membantu masyarakat luas untuk lebih memahami mengenai kebijakan pemerintah dalam usaha penanganan dampak pandemi Covid-19. Bagi

pemerintah Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam perihal pembuatan kebijakan baru kedepannya.

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil studi kasus di Kota Surabaya dan difokuskan untuk menganalisis bagaimana tingkat efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi usaha mikro. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung melalui penyebaran kuesioner.

Data primer pada penelitian ini merupakan informasi yang didapatkan langsung melalui kuesioner dari para pelaku usaha mikro di Kota Surabaya sebagai responden atas penelitian ini. Teknik *Purposive Sampling* digunakan untuk menentukan sampel dimana yang dapat mengisi kuesioner harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan dari kebijakan pemerintah yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kesenjangan penelitian, lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat teori-teori dan penelitian sebelumnya yang dijadikan pedoman dalam membahas permasalahan, serta hipotesis yang digunakan untuk mengambil keputusan dari hasil penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Metode penelitian memuat metode yang digunakan dalam penelitian ini dan model analisis yang digunakan.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan memuat gambaran umum objek penelitian, analisis model, pembuktian hipotesis, dan pembahasan.

BAB 5 : PENUTUP

Penutup memuat kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat diberikan kepada pengambil kebijakan dan peneliti selanjutnya.